

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN**  
**INTERNAL DOSEN**  
**Progam Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi**



**KONTRIBUSI ALOKASI PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**(APBDESA) PADA INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) SATU**  
**KERESIDENAN BOJONEGORO**

**Tim Peneliti:**

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>Hening Anitasari, S.E., M.M.</b>    | <b>0716127701</b>  |
| <b>Khalid Fauzi Aziz, S.E., M.Acc.</b> | <b>0703128806</b>  |
| <b>Yustika Arida Putri</b>             | <b>22602011156</b> |

*Dibiayai oleh:*

*Universitas Bojonegoro*

*Periode 2 Tahun Anggaran 2023/2024*

027/LPPM-LIT/UB/X/2023

**UNIVERSITAS BOJONEGORO**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

### PENELITIAN PENDANAAN PERGURUAN TINGGI

1. **Judul Penelitian** : Kontribusi Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Satu Keresidenan Bojonegoro
2. **Ketua Peneliti**
  - a. Nama Peneliti : Hening Anitasari
  - b. NIDN : 0716127701
  - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
  - d. E-mail : heninganita@gmail.com
  - e. Bidang Keilmuan : Ekonomi
3. **Anggota Peneliti 1**
  - a. Nama : Khalid Fauzi Aziz
  - b. NIDN : 0703128806
  - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
  - d. E-mail : khalid@unigoro.ac.id
  - e. Bidang Keilmuan : Ekonomi
- Anggota Peneliti 2**
  - a. Nama (Mahasiswa) : Yustika Arida Putri
  - b. NIM : 22602011156
  - c. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
  - d. E-mail : yustikaarida@gmail.com
  - e. Bidang Keilmuan : Ekonomi
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Keresidenan Bojonegoro
7. Dana Diusulkan : Rp. 3.000.000,-

Bojonegoro, 05 Maret 2024

**Mengetahui,**

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,



**Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.**  
NIDN 07 2108 8601

**Hening Anitasari, S.E., M.M.**  
NIDN. 07 1612 7701

## **KATA PENGANTAR**

**Assalamu'alaikum,**

Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Kontribusi Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Satu Keresidenan Bojonegoro.

Peneliti menyadari bahwa adanya kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki dalam melakukan penelitian ini. Peneliti berharap penelitian ini dapat membantu untuk memperluas wawasan dan pengetahuan dalam konteks ekonomi. Sehingga peneliti mengucapkan terima kasih kepada LPPM dan Fakultas Ekonomi serta Universitas Bojonegoro yang telah memberikan kesempatan penelitian.

**Wassalamu'alaikum.**

## DAFTAR ISI

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Halaman Pengesahan .....                                 | i   |
| Kata Pengantar .....                                     | ii  |
| Daftar Isi.....                                          | iii |
| Daftar Tabel .....                                       | iv  |
| Daftar Gambar.....                                       | v   |
| Abstrak .....                                            | vi  |
| BAB I: PENDAHULUAN .....                                 | 1   |
| 1.1. Latar Belakang.....                                 | 1   |
| 1.2. Rumusan Masalah.....                                | 4   |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                              | 5   |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                             | 5   |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA.....                            | 6   |
| 2.1. Landasan Teori.....                                 | 6   |
| 2.2. Penelitian Terdahulu .....                          | 12  |
| 2.3. Kerangka Konseptual .....                           | 16  |
| BAB III: METODE PENELITIAN .....                         | 17  |
| 3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....                | 17  |
| 3.2. Lokasi Penelitian.....                              | 17  |
| 3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengumpulan Sampel..... | 17  |
| 3.4. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....         | 17  |
| 3.5. Analisa Data .....                                  | 18  |
| BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN .....                       | 21  |
| 4.1. Hasil Penelitian .....                              | 21  |
| 4.2. Pembahasan.....                                     | 27  |
| BAB V: PENUTUP .....                                     | 29  |
| 5.1. Kesimpulan .....                                    | 29  |
| 5.2. Saran.....                                          | 29  |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                     |     |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....                     | 12 |
| Tabel 4.1 Hasil Multikolinearitas Bojonegoro .....       | 22 |
| Tabel 4.2 Hasil Multikolinearitas Lamongan .....         | 22 |
| Tabel 4.3 Hasil Multikolinearitas Tuban .....            | 22 |
| Tabel 4.4 Hasil Autokorelasi Bojonegoro.....             | 23 |
| Tabel 4.5 Hasil Autokorelasi Lamongan .....              | 23 |
| Tabel 4.6 Hasil Autokorelasi Tuban .....                 | 23 |
| Tabel 4.7 Hasil Regresi Linear Berganda Bojonegoro ..... | 23 |
| Tabel 4.8 Hasil Regresi Linear Berganda Lamongan .....   | 24 |
| Tabel 4.9 Hasil Regresi Linear Berganda Tuban .....      | 24 |
| Tabel 4.10 Hasil Koefisien Determinasi Bojonegoro .....  | 25 |
| Tabel 4.11 Hasil Koefisien Determinasi Lamongan.....     | 25 |
| Tabel 4.12 Hasil Koefisien Determinasi Tuban.....        | 25 |
| Tabel 4.13 Hasil Simultan Bojonegoro.....                | 25 |
| Tabel 4.14 Hasil Simultan Lamongan.....                  | 25 |
| Tabel 4.15 Hasil Simultan Tuban.....                     | 26 |
| Tabel 4.16 Hasil Parsial Bojonegoro .....                | 26 |
| Tabel 4.17 Hasil Parsial Lamongan .....                  | 26 |
| Tabel 4.18 Hasil Parsial Tuban .....                     | 27 |

## **DAFTAR GAMBAR**

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian ..... | 16 |
| Gambar 4.1 Hasil Normalitas Bojonegoro .....    | 21 |
| Gambar 4.2 Hasil Normalitas Lamongan.....       | 21 |
| Gambar 4.3 Hasil Normalitas Tuban .....         | 22 |

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan pengaruh Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Keresidenan Bojonegoro. Metode yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif yang dimaksudkan untuk menjelaskan hasil penelitian tentang pengaruh yang ditimbulkan variabel-variabelnya. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang telah diolah secara statistik yang bersumber dari informasi Indeks Pembangunan Manusia Keresidenan Bojonegoro periode tahun 2017-2021. Analisis data menggunakan alat analisis berbentuk *evIEWS* dengan model analisa regresi linier berganda yaitu asumsi klasik, uji regresi dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kabupaten yang memiliki kontribusi pada indeks pembangunan manusia yaitu Kabupaten Lamongan dilihat melalui variabel pendapatan desa dan belanja desa. Sedangkan hasil uji parsial dan simultan yang memiliki hasil signifikan dan berpengaruh pada indeks pembangunan manusia juga Kabupaten Lamongan. Sehingga hasil ini dapat dikatakan bahwa tidak semua kabupaten pada keresidenan Bojonegoro terkait APBDesa berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kata Kunci: Pendapatan; Belanja Desa; Indeks Pembangunan Manusia

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan Manusia bisa dipaparkan sebagai upaya menghasilkan/membagikan ekspansi opsi untuk penduduk (*a process of enlarging people's choices*) ialah sesi kenaikan taraf hidup manusia. Perihal ini sebagaimana yang dirilis oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1996 tentang konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep ini terdengar berbeda bila dibanding dengan konsep klasik pembangunan yang menitikberatkan pada perkembangan ekonomi. Pembangunan manusia memperluas jabaran konsep pembangunan dari penjelasan tentang cara-cara (perkembangan PDB) ke penjelasan tentang tujuan akhir pembangunan. Dalam konsep ini, manusia digunakan selaku tujuan akhir (*the ultimate end*), serta upaya pembangunan dipandang selaku fasilitas untuk menggapai tujuan tersebut (Qasim, 2013).

Pembangunan manusia ialah penanda utama dalam mengukur tingkatan kesejahteraan warga. Pembangunan manusia sudah diakui secara global sebagai salah satu aspek utama kekayaan bangsa, dikarenakan suatu proses ataupun tata cara untuk menggapai kenaikan mutu hidup. Perihal ini juga dijelaskan oleh Maqin (2007) bahwa dalam mewujudkan pembangunan yang berkepanjangan baik ditingkat wilayah ataupun pusat wajib bertumpu pada manusia selaku akselerator pembangunan.

Tujuan utama dari pembangunan merupakan untuk menghasilkan area yang memungkinkan penduduknya dapat menikmati usia tua, hidup sehat, serta melaksanakan kehidupan yang produktif. Perihal penting yang dikembangkan dalam pembangunan manusia yaitu mengutamakan manusia sebagai pusat perhatian (bukan sebagai perlengkapan ataupun instrument) dan memperluas pilihan-pilihan untuk manusia secara totalitas (tidak cuma terbatas pada pemasukan atas aspek ekonomi semata) dalam menata masa depan kehidupannya.

Dalam konteks Negeri Indonesia, komitmen pemerintah dalam membangun IPM masuk kedalam amanah Pembukaan UUD 1945, ialah



memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah itu dijabarkan kedalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025, ialah mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, dan mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Dengan demikian, UUD 1945 ialah landasan normatif untuk pembangunan yang mengamanatkan kepada pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum serta keadilan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini ialah salah satu tujuan bangsa yang sejalan dengan penegasan UNDP dengan menggarisbawahi bahwa tujuan utama pembangunan merupakan kesejahteraan manusia. Dengan demikian, IPM ialah konsep pembangunan yang dapat dimaknai sebagai usaha ataupun proses untuk melaksanakan pergantian kearah yang lebih baik.

Peningkatan IPM tidak cuma pada perkembangan ekonomi, namun juga pembangunan dari seluruh aspek. Untuk menyelaraskan perkembangan ekonomi dengan pembangunan manusia, maka dibutuhkan pembangunan yang menyeluruh. Melewati pembangunan yang menyeluruh, dapat ditentukan seluruh masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan tersebut.

Sebagian pakar demografi berpendapat, rendahnya IPM antara lain disebabkan terdapat disparitas akses terhadap hasil pembangunan dan perkembangan ekonomi. Adakalanya penyebabnya juga karena proses suatu aktivitas kenaikan pembangunan yang tidak pas. Walaupun inputnya telah mencukupi tetapi tidak menghasilkan output sesuai yang diharapkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam perihal ini bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia diperlukan dana maupun anggaran untuk pembangunan wilayah tersebut.

Negeri Indonesia, sudah memberlakukan UU No 32 Tahun 2004 yang mengendalikan tentang Pemerintah daerah yang membagikan kewenangan penuh untuk tiap-tiap wilayah, baik ditingkat provinsi ataupun ditingkat kabupaten/kota untuk mengendalikan serta mengurus sendiri rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin jadi intervensi dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut diketahui dengan sebutan Otonomi Daerah. Menyoroti keuangan daerah di masa otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari kebijakan desentralisasi fiskal.

Kebijakan desentralisasi fiskal ini diseleksi selaku salah satu upaya buat tingkatan daya guna serta efisiensi ekonomi publik supaya terjalin kenaikan pelayanan publik serta kenaikan kesejahteraan masyarakat (Oates, 1972). Dengan desentralisasi fiskal diharapkan terjalin revenue lewat dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kenaikan Pemasukan Asli Daerah (PAD) serta terjalin penghematan pembelanjaan pemerintah sehingga menaikkan efisiensi pembelanjaan, sebab pemakaian dana APBD lebih tepat sasaran serta berdaya guna, sebab pemerintah wilayah lebih mengenali keadaan kebutuhan serta prefensi pembangunan wilayah tiap- tiap (Sumarsono dan Utomo, 2009).

Desentralisasi fiskal berawal dari kebijakan transfer antar pemerintah (*intergovernmental transfer*) yang jadi landasan finansial pemerintah daerah di banyak negeri maju serta tumbuh. Sebutan universal “transfer” kerap digunakan untuk mengacu pada beberapa tipe instrumen pembiayaan publik, hibah, subsidi, serta apalagi untuk hasil pemasukan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Transfer antar pemerintah digunakan buat memacu bermacam tujuan yang menyangkut kebijakan publik (Martinez-Vazquez and Boex, 1999).

Sesungguhnya pelimpahan tugas kepada pemerintah wilayah dalam prinsip desentralisasi fiskal pula diiringi dengan pelimpahan keuangan, perihal ini sejalan dengan prinsip “*money follows function*”. Tanpa pelimpahan ini, otonomi wilayah jadi tidak bermakna (Khusaini, 2006). UU Nomor. 33 Tahun 2004 dalam pasal 3 ayat 1 melaporkan kalau Pemasukan Asli Daerah (PAD) bertujuan membagikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penerapan otonomi daerah sesuai dengan kemampuan wilayah sebagai bentuk penerapan desentralisasi.

Dengan pemberian keleluasaan untuk wilayah dalam mengelola keuangannya diharapkan terbentuknya kenaikan pemasukan wilayah. Kenaikan pemasukan wilayah berarti pula hendak tingkatan anggaran belanja wilayah. Kenaikan belanja wilayah hendak tingkatan mutu kehidupan warga lewat kenaikan pelayanan bawah, pembelajaran, kesehatan, sarana sosial serta sarana universal yang layak. Sehingga terdapatnya kenaikan Pemasukan serta Belanja

Daerah (APBD) sepatutnya diiringi kenaikan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Tidak hanya tingkatan pelayanan publik, tujuan utama desentralisasi fiskal merupakan mewujudkan kemandirian daerah. Kemandirian dalam makna kecil merupakan keahlian pemerintah buat membiayai pembangunannya sendiri (Sudantoko, 2003). Sehingga pemerintah daerah diharapkan sanggup menggali sumber-sumber keuangan lokal khususnya untuk penunjang kebutuhan pembiayaan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya lewat pemasukan asli daerah. Dengan demikian sesungguhnya pemasukan asli daerah idealnya jadi sumber pemasukan pokok daerah, sebab sumber pemasukan lain bisa bertabiat fluktuatif serta cenderung diluar kontrol kewenangan daerah (Mardiasmo, 2021).

Alokasi pendapatan dan belanja ialah aspek utama dalam memastikan pembangunan sesuatu wilayah. Baik pembangunan fisik (pembangunan infrastruktur) ataupun non fisik (pembangunan manusia), yang tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tetapi bila dilihat dari bermacam informasi empirik yang didapat, penerapan desentralisasi fiskal dihadapkan kekurang-mapanan dalam implementasinya. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer ini sedemikian besar walaupun kebijakan desentralisasi fiskal yang digulirkan menghendaki kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangannya supaya percepatan pembangunan dan pelayanan publik lebih terfokus serta terdistribusi secara menyeluruh diseluruh daerah.

Berdasarkan penjabaran latar belakang peneliti tertarik untuk melihat kontribusi Alokasi Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada Indeks Pembangunan Manusia satu Keresidenan Bojonegoro (Bojonegoro, Lamongan dan Tuban). Sehingga hasil penelitian ini mampu menggambarkan kekuatan daerah dalam pembangunan manusiannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Sesuai dengan penjelasan pada latar belakang, bahwa implementasi pembangunan manusia belum seutuhnya bisa dilakukan oleh pemerintah daerah

secara mandiri. Sehingga perlu diteliti dengan pertanyaan untuk memperjelasnya. Berikut ini pertanyaan penelitian:

1. Seberapa besar kontribusi APBDesa pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Keresidenan Bojonegoro?
2. Manakah kabupaten pada kersidenan yang memiliki pengaruh besar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Didasarkan umusan permasalahan, peneliti membuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi APBDesa pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Keresidenan Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui kabupaten pada kersidenan yang memiliki pengaruh besar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian digunakan sebagai bahan rujukan spesialnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam pnelitian ini, dan hasil penelitian ini diharapkan bisa membagikan ide serta pengembangan teori.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia**

###### **1) Pengertian Indeks Pembangunan Manusia**

*United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia (*human development*) sebagai upaya untuk menghasilkan/membagikan ekspansi pilihan untuk penduduk (*enlarging people's choice*). Konsep berpikir ini tercipta dari uraian bahwa pembangunan merupakan proses pergantian yang direncanakan untuk membetulkan bermacam aspek kehidupan ataupun sistem sosial ke arah yang lebih baik, yang dimaknai dengan terdapatnya kemajuan (*progress*), perkembangan (*growth*), serta diversifikasi(*diversification*). Ekspansi pilihan penduduk yang diartikan meliputi pilihan berumur panjang, hidup sehat, berilmu pengetahuan, memiliki akses terhadap sumber energi yang diperlukan supaya bisa hidup layak. Pada saat yang sama, pembangunan manusia juga dimaknai selaku pembangunan keahlian seorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan ataupun pembelajaran serta keahlian (Anggraini, 2018).

Sebagaimana dilansir dari *Human Development Report*, terdapat sebagian premis berarti dalam pembangunan manusia, antara lain (Einarsson, 2004):

1. Pembangunan wajib mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan untuk penduduk, tidak cuma tingkat pemasukan mereka, oleh sebab itu konsep pembangunan manusia wajib terpusat pada penduduk secara totalitas, serta bukan cuma pada aspek ekonominya saja.
3. Pembangunan manusia mencermati bukan cuma pada upaya tingkatkan keahlian (kapabilitas) manusia namun pula pada upaya-upaya menggunakan keahlian manusia tersebut secara maksimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh 4 pilar pokok, ialah: produktifitas, pemerataan, kesinambungan serta pemberdayaan. Pembangunan manusia jadi

bawah buat penentuan tujuan pembangunan serta dalam menganalisis pilihan-pilihan buat mencapainya.

Bersumber pada konsep tersebut, penduduk ditempatkan selaku tujuan akhir sebaliknya upaya pembangunan ditatap selaku fasilitas buat mencapai tujuan tersebut. Berikutnya dalam laporan Pembangunan Manusia tahun 2012, UNDP melaporkan terdapat 4 pilar pokok yang wajib dicermati buat menjamin tercapainya pembangunan manusia, ialah:

a. Produktifitas

Warga wajib bisa tingkatkan produktifitas serta berpartisipasi secara penuh dalam mendapatkan pemasukan ataupun pekerjaan yang memperoleh upah.

b. Pemerataan

Penduduk wajib mempunyai peluang serta kesempatan yang sama untuk memperoleh akses terhadap seluruh sumber ekonomi serta sosial. Seluruh hambatan yang memperkecil kesempatan buat memperoleh akses tersebut wajib dihilangkan, supaya mereka bisa mengambil khasiat dari peluang yang terdapat serta berpartisipasi dalam aktivitas produktif yang bisa tingkatkan mutu hidup.

c. Keberlanjutan

Seluruh aktivitas dalam rangka pembangunan manusia dicoba terus menerus.

d. Pemberdayaan

Seluruh susunan warga wajib berpartisipasi dalam keputusan serta proses yang hendak memastikan arah kehidupan mereka, dan buat berpartisipasi serta mengambil khasiat dari proses pembangunan.

## **2) Tata cara Pengukuran serta Penataan IPM**

Penanda pembangunan manusia ialah salah satu penanda berarti yang bisa digunakan dalam perencanaan serta penilaian pembangunan, pada tingkatan nasional ataupun pada tingkatan wilayah. Penanda ini dipopulerkan oleh UNDP melalui Laporan Pembangunan Manusia (*Human Development Report*) yang diterbitkan awal kali pada tahun 1990 yang diketahui dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Hopkins, 1991).

Dalam menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ada 3 perihal mendasar yang digunakan buat mengukur pencapaian rata-rata sesuatu negeri dalam pembangunan manusia, ialah: hidup sehat serta usia panjang/ kesempatan hidup (*longevity*) yang diwakili oleh angk harapan hidup dikala lahir, pembelajaran/ pengetahuan (*knowledge*) yang diwakili oleh rata- rata antara harapan lama sekolah penduduk umur berusia dengan rata- rata lama sekolah, serta standar kehidupan layak (*decent living*) yang diwakili oleh pengeluaran perkapita yang disesuaikan (BPS Bojonegoro, 2019).

Untuk tiap komponen IPM, tiap-tiap indeks bisa dihitung dengan syarat umum berikut:

a. Kesempatan Hidup (*Longevity*)

Umur hidup diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir ataupun *life expectancy at birth* (AHH). Penghitungan dicoba bersumber pada 2 informasi sadar, ialah rata- rata ALH( anak lahir hidup) serta rata-rata AMH (anak masih hidup) per perempuan umur 15-49 tahun bagi kelompok usia 5 tahunan. Penghitungan AHH dicoba dengan tata cara tidak langsung (*indirect technique*). Pada komponen Angka Harapan Hidup, angka paling tinggi selaku batasan atas buat penghitungan indeks merupakan 85 tahun serta terendah merupakan 20 tahun.

b. Pengetahuan (*Knowledge*)

Buat mengukur ukuran pengetahuan, BPS memakai 2 penanda ialah harapan lama sekolah (HLS) serta rata-rata lama sekolah (RLS). Berikutnya rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk umur 25 tahun keatas dalam menempuh pembelajaran resmi. Sebaliknya harapan lama sekolah didefinisikan selaku rata-rata ditaksir banyaknya tahun yang bisa ditempuh oleh seorang sejak lahir. Proses penghitungannya dengan perbandingan bobot 1 untuk HLS serta 1 untuk RLS. Pada tata cara lebih dahulu, HLS tidak dipergunakan serta masih memakai variabel angka melek huruf. Tetapi angka melek huruf kerap dipertanyakan selaku dimensi ukuran pengetahuan sebab angkanya dinilai telah sangat besar di seluruh daerah Indonesia. Sehingga BPS

mengubah dimensi melek huruf dengan dimensi harapan lama sekolah. Alibi penggantian tersebut merupakan menjajaki standar UNDP.

c. Standar Hidup Layak (*Decent Living*)

Angka standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang didasarkan pada *Purchasing Power Parity* (Paritas Daya Beli) dapat pula memakai penanda GDP perkapita riil yang sudah disesuaikan (*adjust real GDP per capita*) ataupun memakai penanda rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (*adjusted real per capita expenditure*).

Angka IPM Berkisar antara 0 sampai 100. Semakin mendekati 100 hingga perihail tersebut ialah gejala pembangunan manusia yang terus menjadi baik. Bersumber pada nilai IPM, UNDP membagi tingkatan status pembangunan manusia sesuatu daerah kedalam 4 kalangan/ tingkatan status ialah:

- 1) Sangat Tinggi :  $IPM \geq 80$
- 2) Tinggi :  $70 \leq IPM < 80$
- 3) Sedang :  $60 \leq IPM < 70$
- 4) Rendah :  $IPM < 60$

### **2.1.2. Pengertian Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah adalah jumlah uang atau sumber daya finansial yang diperoleh oleh suatu pemerintahan daerah, seperti kabupaten, kota, provinsi, atau wilayah otonom lainnya, dalam suatu periode tertentu. Pendapatan daerah biasanya berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil dari penjualan aset, pendapatan dari usaha milik daerah, dan sumber-sumber lainnya (Wulandari dan Iryanie, 2018).

Pendapatan daerah memiliki peran penting dalam membiayai berbagai program dan proyek pembangunan di tingkat daerah, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kegiatan pemerintah lainnya. Pengelolaan pendapatan daerah yang efisien dan transparan sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah dan memastikan pemenuhan kebutuhan masyarakat setempat.

Pendapatan daerah juga dapat berfluktuasi tergantung pada berbagai faktor ekonomi, termasuk kondisi perekonomian nasional dan regional, tingkat



pertumbuhan ekonomi, kebijakan pajak, serta sumber daya alam dan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam menjaga kesejahteraan dan pembangunan di tingkat lokal.

Berikut adalah beberapa komponen pendapatan daerah yang umum (Wulandari dan Iryanie, 2018):

1. Pajak Daerah: Ini termasuk berbagai jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, seperti pajak properti (PBB), pajak penjualan, pajak restoran, dan pajak-pajak lainnya.
2. Retribusi Daerah: Merupakan pungutan atas pelayanan atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak-pihak tertentu, seperti biaya parkir, retribusi pengelolaan sampah, dan sejenisnya.
3. Bagi Hasil Pajak: Beberapa pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), kemudian dibagi antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Hasil Usaha BUMD: BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Keuntungan atau pendapatan yang dihasilkan dari operasi BUMD menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.
5. Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional dan investasi. Dana ini bersifat umum dan digunakan untuk berbagai keperluan (Sembiring, 2019).
6. Dana Alokasi Khusus (DAK): Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk keperluan proyek atau program tertentu (Williantara, 2016).
7. Hibah: Sumbangan atau pemberian dari pihak lain, termasuk pemerintah pusat atau pihak swasta, yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mendukung berbagai program atau proyek.

8. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lainnya: Komponen lain dari pendapatan daerah yang mungkin bervariasi tergantung pada karakteristik dan potensi daerah masing-masing (Juliana. 2020).

### **2.1.3. Pengertian Belanja Daerah**

Belanja daerah merujuk pada pengeluaran atau pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau wilayah otonomi dalam rangka menyelenggarakan berbagai program, kegiatan, dan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah tersebut. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran yang dibiayai oleh pendapatan daerah, baik itu untuk tujuan rutin seperti gaji pegawai dan operasional pemerintah, maupun untuk tujuan pembangunan dan investasi seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan lainnya (Hanantoko, 2020).

Berikut adalah beberapa komponen umum dari belanja daerah:

1. Belanja Pegawai: Ini mencakup gaji dan tunjangan pegawai pemerintah daerah, termasuk pegawai di sektor pendidikan, kesehatan, kepolisian, dan sektor-sektor lainnya.
2. Belanja Barang dan Jasa: Ini termasuk pembelian berbagai barang dan jasa yang diperlukan untuk operasional pemerintah, seperti peralatan kantor, kendaraan, kontraktor, dan lain sebagainya.
3. Belanja Modal: Ini adalah pengeluaran untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah, rumah sakit, dan proyek-proyek lainnya.
4. Belanja Subsidi: Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada sektor-sektor tertentu, seperti transportasi umum, energi, atau sektor pertanian, untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi.
5. Belanja Bantuan Sosial: Dana yang dialokasikan untuk program-program bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program keluarga miskin, program pangan, dan program bantuan lainnya.
6. Belanja Pendidikan: Dana yang digunakan untuk pendidikan, termasuk biaya operasional sekolah, pengadaan buku pelajaran, pelatihan guru, dan pengembangan kurikulum.

7. Belanja Kesehatan: Ini mencakup biaya operasional rumah sakit, puskesmas, program imunisasi, dan upaya kesehatan masyarakat lainnya.
8. Belanja Lingkungan Hidup: Pengeluaran yang digunakan untuk pelestarian lingkungan, seperti pengelolaan sampah, pengendalian polusi, dan perlindungan sumber daya alam.
9. Belanja Lainnya: Komponen ini mencakup berbagai pengeluaran lain yang tidak termasuk dalam kategori-kategori di atas, seperti hibah kepada pihak ketiga, pembayaran utang, dan lain sebagainya.

Belanja daerah harus direncanakan, dialokasikan, dan diawasi dengan cermat agar sumber daya keuangan daerah digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pembangunan dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Pengawasan yang baik atas belanja daerah juga penting untuk mencegah penyalahgunaan dana publik dan memastikan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap penggunaan anggaran.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini menggunakan referensi dari beberapa artikel yang sudah ditulis ditabel 2.1, berikut penyajiannya.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No. | Nama dan Tahun Penelitian         | Metode Penelitian         | Variabel atau Instrumen                                                                                                                                                               | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Vella Kurniasih Fitri, dkk., 2014 | Analisis Regresi berganda | Variabel:<br>Alokasi Belanja Modal, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Otonomi mempunyai pengaruh negatif pengaruhnya terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Tingkat efektivitas mempunyai pengaruh positif terhadap belanja modal untuk pelayanan publik. Itu |

|   |                              |                           |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                              |                           | Umum (DAU).                                                                     | Tingkat efisiensi mempunyai pengaruh negatif terhadap belanja modal masyarakat melayani. Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif terhadap permodalan belanja pelayanan publik, dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal untuk pelayanan publik.                                               |
| 2 | Kesit Bambang Prakosa, 2004  | Analisis Regresi berganda | Variabel: Belanja Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD secara parsial maupun kolektif memang berpengaruh terhadap realisasi anggaran dan pajak daerah. Lebih lanjut, dari hasil tersebut dapat kita simpulkan bahwa terdapat <i>flypaper effect</i> yang ditunjukkan oleh DAU yang memiliki kemampuan lebih tinggi dalam memprediksi belanja daerah dibandingkan PAD. |
| 3 | Hening Anitasari, dkk., 2023 | Analisis uji t            | Variabel: Alokasi Dana                                                          | Hasil penelitian mengatakan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                         |                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         |                                                      | Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), Kesejahteraan Masyarakat                            | Pendapatan asli desa berpengaruh dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga pendapatan asli desa masih dominan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Desa Sukorejo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 | Parson Horota, dkk., 20 | Statistik deskriptif dengan menggunakan skala Likert | Variabel: Pendapatan Asli Daerah (PAD), faktor penghambat, potensi pajak dan retribusi daerah. | Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura belum optimal, sehingga kontribusi terhadap PAD masih relatif rendah. Padahal daerah ini mempunyai potensi pajak yang besar, khususnya bea bumi dan bangunan Bea Balik Nama (BPHTB), pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, dan pajak bukan batu dan logam, yang tidak digali secara optimal. Begitu pula dengan retribusi daerah yang mempunyai potensi besar, khususnya retribusi pelayanan kesehatan, izin gangguan, dan |

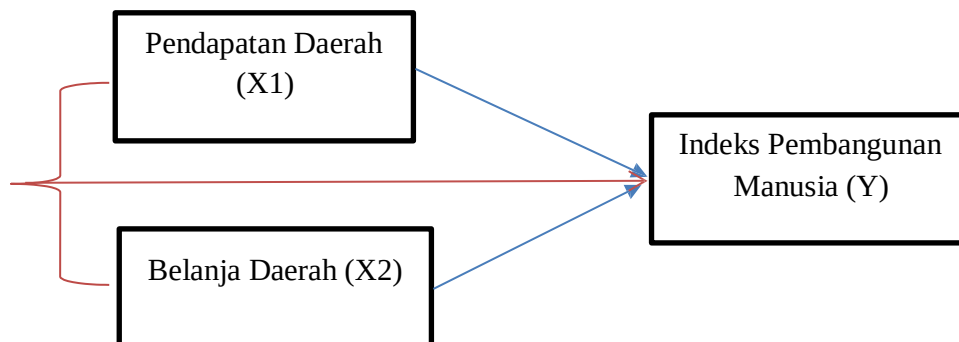
|   |                                         |                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                         |                           |                                                                                                         | <p>pelayanan sampah. Karena itu, implementasi strategi yang segera efektif untuk meningkatkan hasil pungutan sesuai potensi yang tersedia, yang mampu mendorong peningkatan PAD secara signifikan di masa depan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5 | Filma Ayu Dian Palupi dan Sulardi, 2018 | Analisis Regresi berganda | <p>Variabel: alokasi belanja modal, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.</p> | <p>Hasil uji data membuktikan bahwa perubahan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap perubahan alokasi belanja modal, perubahan dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap perubahan alokasi belanja modal, perubahan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal, dan perubahan dana yang tidak terpakai berpengaruh positif terhadap perubahan alokasi belanja modal. Kesimpulan penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pembuatan anggaran guna mencapai anggaran yang efektif dan efisien, serta dapat mengoptimalkan</p> |

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | potensi daerah khususnya untuk pelayanan publik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menggunakan perubahan anggaran pemerintah daerah pada tahun yang sama tanpa melibatkan realisasinya. |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sumber: Hasil penelitian sebelumnya diolah (2023)

### 2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual yang dibuat pada penelitian ini disesuaikan dengan tujuannya yaitu melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan pendapatan daerah dan belanja daerah pada indeks pembangunan manusia. Sehingga dapat peneliti gambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Data diolah, 2023

Keterangan:

— : Parsial

— : Simultan

Berdasarkan gambar 2.1 maka peneliti merumuskan hipotesis untuk penelitian sebagai berikut:

1. H1: diduga variabel pendapatan dan belanja desa berpengaruh secara parsial Indeks Pembangunan Manusia
2. H2: diduga variabel pendapatan dan belanja desa berpengaruh secara simultan Indeks Pembangunan Manusia.



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan kuantitatif yang berupa asosiatif. Bagi Sugiyono (2013), pendekatan kuantitatif merupakan tata cara riset yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan buat mempelajari populasi ataupun ilustrasi tertentu yang bertujuan buat menguji hipotesis yang sudah diresmikan. Penelitian ini berupa asosiatif ialah riset yang bertujuan untuk mengenali ikatan antara 2 variabel ataupun lebih.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini merupakan Keresidenan Bojonegoro. Objek dari penelitian ini, merupakan data Indeks Pembangunan Manusia yang diambil dari website Badan Pusat Statistik (Keresidenan Bojonegoro) selama tahun 2017- 2021.

### **3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi dan sampel penelitian ini menggunakan data sekunder yang ada di Badan Pusat Statistik dengan cakupan wilayah Keresidenan Bojonegoro. Sehingga data diambil seluruhnya secara *purposive sampling*.

### **3.4 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan informasi sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang telah diolah secara statistik yang bersumber dari informasi Indeks Pembangunan Manusia Keresidenan Bojonegoro periode tahun 2017- 2021.

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan memakai penelitian dokumentasi serta penelitian pustaka. Tata cara pengumpulan data dengan metode penelitian dokumentasi dilakukan dengan mempelajari serta menggunakan informasi ataupun dokumen yang dihasilkan oleh pihak- pihak lain, seperti dengan cara mencatat, mengutip, dan mengumpulkan informasi dari

dokumen yang ada pada Badan Pusat Statistik. Sebaliknya penelitian pustaka berasal dari hasil- hasil riset serta buku-buku literatur untuk mengenali pendapat para pakar sebagai informasi teoritis serta rujukan yang hendak digunakan selaku bahan pembanding.

### **3.5 Analisis Data**

Metode analisis data kuantitatif merupakan wujud analisa yang memakai angka-angka serta perhitungan dengan tata cara statistik untuk menguji kebenaran hipotesis penelitian yang sudah diajukan lebih dahulu. Dalam penelitian ini memakai alat analisis berbentuk eviews dengan model analisa regresi linier berganda

#### **3.5.1. Uji Asumsi Klasik**

##### **1) Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu ataupun residual mempunyai distribusi wajar. Terdapat 2 metode untuk mengetahui apakah residual berdistribusi wajar ataupun tidak ialah dengan analisis grafik serta uji statistik (Ghozali, 2012). Pengujian normalitas dilakukan dengan menguji (*Kolmogrov-Sminov*).

##### **2) Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemui terdapatnya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik sepatutnya tidak terjalin korelasi antara variabel independen. Bila variabel independen saling berkorelasi, hingga variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0 (nol). Untuk mengetahui terdapat ataupun tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi merupakan selaku berikut (Ghozali, 2012):

- (1.) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh sesuatu ditaksir model regresi empiris sangat besar, namun secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan pengaruhi variabel dependen.

(2.) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Bila antar variabel independen terdapat korelasi yang lumayan besar (biasanya diatas 0,90), sehingga hal ini dikatakan gejala multikolinieritas. Multikolinieritas bisa diakibatkan oleh terdapatnya dampak campuran 2 ataupun lebih variabel independen.

(3.) Multikolinieritas juga bisa dilihat dari nilai *tolerance* serta lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen terpilih yang tidak dipaparkan oleh variabel independen yang lain. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF besar sebab  $VIF = 1 / \text{Tolerance}$ . Nilai *cutoff* yang universal dipakai buat menampilkan terdapatnya multikolinieritas merupakan nilai tolerance  $\leq 0,10$  ataupun sama dengan nilai  $VIF \geq 10$ .

### 3) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1. Bila terjalin korelasi, hingga dinamakan terdapat problem korelasi. Model yang baik merupakan regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali, 2012).

### 3. 5. 2 Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda ialah model statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh 2 ataupun lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mendapatkan cerminan pengaruh pendapatan dan belanja pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Keresidenan Bojonegoro. Model analisis regresi linier berganda ditunjukkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + e$$

Keterangan:

|                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Y                                    | : Indeks Pembangunan Manusia        |
| $\beta_0$                            | : Bilangan konstan                  |
| $\beta_1; \beta_2; \beta_3; \beta_4$ | : Koefisien regresi masing-masing X |
| $X_1$                                | : Pendapatan                        |
| $X_2$                                | : Belanja                           |
| e                                    | : <i>error</i>                      |

### 3.5.3 Uji Hipotesis

#### 1) Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengenali seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel X terhadap perubahan variabel Y. Ghazali (2018), besarnya nilai  $R^2$  merupakan  $0 \leq R^2 \leq 1$ , dimana semakin mendekati 1 berarti model tersebut bisa dikatakan baik sebab semakin dekat hubungan antar variabel independen dengan dependen, demikian kebalikannya.

#### 2) Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan (Uji F) bertujuan untuk mengenali tingkat signifikansi pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan memakai signifikansi tingkat 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Ada juga kriteria pengambilan keputusan merupakan selaku berikut:

(1.) Bila nilai signifikansi  $F < 0,05$  hingga hipotesis alternatif diterima.

(2.) Bila nilai signifikansi  $F > 0,05$  hingga hipotesis alternatif ditolak.

#### 3) Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji T-test) digunakan untuk mengenali pengaruh tiap-tiap variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2012). Ada juga kriteria pengajuan secara parsial dengan tingkatan tingkat of signifikan  $\alpha = 0,05$  merupakan selaku berikut:

(1.) Bila nilai signifikansi  $t < 0,05$  hingga hipotesis diterima yang maksudnya variabel independen mempengaruhi terhadap variabel dependen.

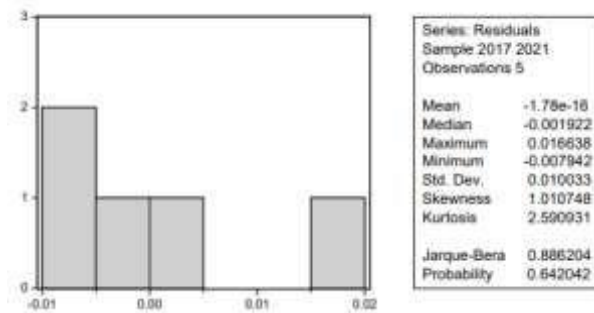
(2.) Bila nilai signifikansi  $t > 0,05$  hingga hipotesis ditolak yang maksudnya variabel independen tidak mempengaruhi terhadap variabel dependen.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Asumsi Klasik

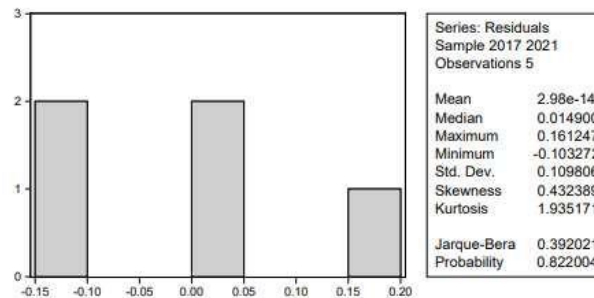
##### 1. Uji Normalitas



Sumber: data diolah, 2023

Gambar 4.1. Hasil Normalitas Bojonegoro

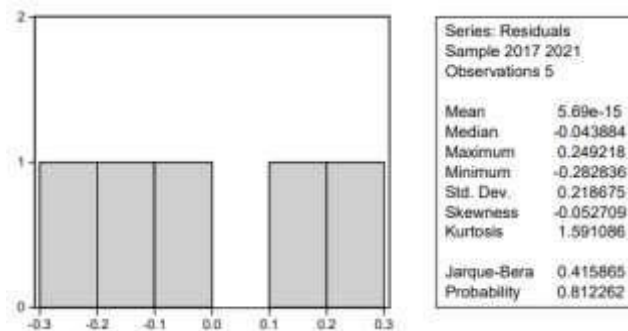
Gambar 4.1 merupakan hasil perhitungan uji normalitas menggambarkan bahwa dengan melihat probability yaitu  $0.642 > 0.05$  yang artinya data (pendapatan desa dan belanja desa) yang digunakan normal.



Sumber: data diolah, 2023

Gambar 4.2. Hasil Normalitas Lamongan

Gambar 4.2 merupakan hasil perhitungan uji normalitas menggambarkan bahwa dengan melihat probability yaitu  $0.642 > 0.05$  yang artinya data (pendapatan desa dan belanja desa) yang digunakan normal.



Sumber: data diolah, 2023

Gambar 4.3. Hasil Normalitas Tuban

Gambar 4.3 merupakan hasil perhitungan uji normalitas menggambarkan bahwa dengan melihat probability yaitu  $0.642 > 0.05$  yang artinya data (pendapatan desa dan belanja desa) yang digunakan normal.

## 2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.1. Hasil Multikolinearitas Bojonegoro

| Variabel        | VIF      |
|-----------------|----------|
| Pendapatan Desa | 9.022767 |
| Belanja Desa    | 9.022767 |

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai tabel 4.1 hasil perhitungan multikolinearitas masih dibawah ketentuan yaitu dibawah 10, maka dapat dikatakan pendapatan desa tidak mengalami multikolinearitas dan tidak belanja desa mengalami multikolinearitas.

Tabel 4.2. Hasil Multikolinearitas Lamongan

| Variabel        | VIF      |
|-----------------|----------|
| Pendapatan Desa | 699.4745 |
| Belanja Desa    | 699.4745 |

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai tabel 4.2 hasil perhitungan multikolinearitas dengan ketentuan yaitu 10, maka dapat dikatakan pendapatan desa mengalami multikolinearitas dan belanja desa mengalami multikolinearitas.

Tabel 4.3. Hasil Multikolinearitas Tuban

| Variabel | VIF |
|----------|-----|
|----------|-----|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Pendapatan Desa | 20.93041 |
| Belanja Desa    | 20.93041 |

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai tabel 4.3 hasil perhitungan multikolinearitas dengan ketentuan yaitu 10, maka dapat dikatakan pendapatan desa mengalami multikolinearitas dan belanja desa mengalami multikolinearitas.

### 3. Uji Autokorelasi

Tabel 4.4. Hasil Autokorelasi Bojonegoro

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <i>Durbin-Watson</i> | 0.968531 |
|----------------------|----------|

Sumber: data diolah, 2023

Pada tabel 4.4 diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan desa dan belanja desa yang digunakan mengalami autokorelasi atau terkena gejala autokorelasi dengan nilai 0.968531 diatas 3.

Tabel 4.5. Hasil Autokorelasi Lamongan

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <i>Durbin-Watson</i> | 1.810318 |
|----------------------|----------|

Sumber: data diolah, 2023

Pada tabel 4.5 diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan desa dan belanja desa yang digunakan tidak mengalami autokorelasi atau terhindar dari gejala autokorelasi dengan nilai 1.810318 masih dibawah 3.

Tabel 4.6. Hasil Autokorelasi Tuban

|                      |          |
|----------------------|----------|
| <i>Durbin-Watson</i> | 1.985317 |
|----------------------|----------|

Sumber: data diolah, 2023

Pada tabel 4.6 diperoleh hasil bahwa variabel pendapatan desa dan belanja desa yang digunakan tidak mengalami autokorelasi atau terhindar dari gejala autokorelasi dengan nilai 1.985317 masih dibawah 3.

### Uji Regresi Linear Berganda Bojonegoro

Tabel 4.7. Hasil Regresi Linear Berganda Bojonegoro

| Variabel         | <i>Coefficient</i> | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <i>Constanta</i> | 3.198689           | 3.994325           | 0.0573       |
| Pendapatan Desa  | -0.036329          | -0.358072          | 0.7546       |

|              |          |          |        |
|--------------|----------|----------|--------|
| Belanja Desa | 0.086299 | 0.750419 | 0.5313 |
|--------------|----------|----------|--------|

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.7 maka rumusnya sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + e$$

$$Y = 3.198689 - 0.036329X_1 + 0.086299X_2 + e$$

Sehingga dapat dijelaskan ketika pendapatan desa bertambah 1 maka indeks pembangunan manusia menurun. Sedangkan ketika belanja desa bertambah 1 maka indeks pembangunan juga ikut bertambah.

Tabel 4.8. Hasil Regresi Linear Berganda Lamongan

| Variabel         | <i>Coefficient</i> | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <i>Constanta</i> | 63.47              | 58.29288           | 0.0003       |
| Pendapatan Desa  | 2.55               | 5.479262           | 0.0317       |
| Belanja Desa     | -2.43              | -5.170065          | 0.0354       |

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.8 maka rumusnya sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + e$$

$$Y = 63.47 + 1.55X_1 - 2.43X_2 + e$$

Sehingga dapat dijelaskan ketika pendapatan desa bertambah 1 maka indeks pembangunan manusia juga ikut bertambah. Sedangkan ketika belanja desa bertambah 1 maka indeks pembangunan menjadi menurun.

Tabel 4.9. Hasil Regresi Linear Berganda Tuban

| Variabel         | <i>Coefficient</i> | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <i>Constanta</i> | 55.92              | 23.64811           | 0.0018       |
| Pendapatan Desa  | -1.55              | -0.833918          | 0.4921       |
| Belanja Desa     | 4.27               | 1.975604           | 0.1869       |

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 maka rumusnya sebagai berikut:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + e$$

$$Y = 55.92 - 1.55X_1 + 4.27X_2 + e$$



Sehingga dapat dijelaskan ketika pendapatan desa bertambah 1 maka indeks pembangunan manusia menurun. Sedangkan ketika belanja desa bertambah 1 maka indeks pembangunan juga ikut bertambah.

### Uji Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 4.10. Hasil Koefisien Determinasi Bojonegoro

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <i>R-Square</i> | 0.454375 |
|-----------------|----------|

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 4.10 menjelaskan bahwa kemampuan variabel pendapatan desa dan belanja desa dalam berkontribusi untuk variabel indeks pembangunan manusia sebesar  $0.454375 = 45,44\%$ .

Tabel 4.11. Hasil Koefisien Determinasi Lamongan

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <i>R-Square</i> | 0.979426 |
|-----------------|----------|

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 4.11 menjelaskan bahwa kemampuan variabel pendapatan desa dan belanja desa dalam berkontribusi untuk variabel indeks pembangunan manusia sebesar  $0.979426 = 97,94\%$ .

Tabel 4.12. Hasil Koefisien Determinasi Tuban

|                 |          |
|-----------------|----------|
| <i>R-Square</i> | 0.935378 |
|-----------------|----------|

Sumber: data diolah, 2023

Tabel 4.12 menjelaskan bahwa kemampuan variabel pendapatan desa dan belanja desa dalam berkontribusi untuk variabel indeks pembangunan manusia sebesar  $0.935378 = 93,53\%$ .

### Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.13. Hasil Simultan Bojonegoro

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <i>F-statistic</i>       | 0.832761 |
| <i>Prob(F-statistic)</i> | 0.545625 |

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel pendapatan desa dan belanja desa tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap

variabel indeks pembangunan manusia. Secara statistik dijelaskan  $prob. 0.545625 > 0.05$ ;  $0.832761 < 19.00$ .

Tabel 4.14. Hasil Simultan Lamongan

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <i>F-statistic</i>       | 47.60496 |
| <i>Prob(F-statistic)</i> | 0.020574 |

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai tabel 4.14 dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel pendapatan desa dan belanja desa signifikan dan berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Secara statistik dijelaskan  $prob. 0.020574 < 0.05$ ;  $47.60496 > 19.00$ .

Tabel 4.15. Hasil Simultan Tuban

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <i>F-statistic</i>       | 14.47465 |
| <i>Prob(F-statistic)</i> | 0.064622 |

Sumber: data diolah, 2023

Sesuai tabel 4.15 dapat dijelaskan bahwa secara simultan variabel pendapatan desa dan belanja desa tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Secara statistik dijelaskan  $prob. 0.064622 > 0.05$ ;  $14.47465 < 19.00$ .

### Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.16. Hasil Parsial Bojonegoro

| Variabel        | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Pendapatan Desa | -0.358072          | 0.7546       |
| Belanja Desa    | 0.750419           | 0.5313       |

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 diperoleh hasil variabel pendapatan desa tidak signifikan dan tidak berpengaruh variabel indek pembangunan manusia, secara statistik  $prob. 0.7546 > 0.05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0.358072 < 4.303$ ). Variabel belanja desa tidak signifikan dan tidak berpengaruh variabel indeks pembangunan manusia, secara statistik  $prob. 0.5313 > 0.05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0.750419 < 4.303$ ).

Tabel 4.17. Hasil Parsial Lamongan

| Variabel        | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Pendapatan Desa | 5.479262           | 0.0317       |
| Belanja Desa    | -5.170065          | 0.0354       |

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.17 diperoleh hasil variabel pendapatan desa signifikan dan berpengaruh variabel indeks pembangunan manusia, secara statistik *prob.*  $0.0317 < 0.05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $5.479262 > 4.303$ ). Variabel belanja desa signifikan dan berpengaruh variabel indeks pembangunan manusia, secara statistik *prob.*  $0.0354 > 0.05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-5.170065 > 4.303$ ).

Tabel 4.18. Hasil Parsial Tuban

| Variabel        | <i>t-Statistic</i> | <i>Prob.</i> |
|-----------------|--------------------|--------------|
| Pendapatan Desa | -0.833918          | 0.4921       |
| Belanja Desa    | 1.975604           | 0.1869       |

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.18 diperoleh hasil variabel pendapatan desa tidak signifikan dan tidak berpengaruh variabel indeks pembangunan manusia, secara statistik *prob.*  $0.4921 > 0.05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $-0.833918 < 4.303$ ). Variabel belanja desa tidak signifikan dan tidak berpengaruh variabel indeks pembangunan manusia, secara statistik *prob.*  $0.1869 > 0.05$ ,  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $1.975604 < 4.303$ ).

## 4.2 Pembahasan

### Kontribusi Pendapatan Desa dan Belanja Desa pada Indeks Pembangunan Manusia.

Sesuai dengan hasil penelitian dari ketiga kabupaten yang memiliki kontribusi pada indeks pembangunan manusia yaitu kabupaten lamongan dilihat melalui variabel pendapatan desa dan belanja desa. Porsi pendapatan desa dan belanja desa memegang peranan penting dalam pembentukan indeks pembangunan manusia (IPM) suatu daerah. Pendapatan desa mencakup beberapa sumber keuangan yang dapat digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek pembangunan di tingkat desa. Dengan pendapatan desa, pemerintah desa

dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan komponen terpenting dalam penghitungan IPM.

Selain itu, belanja desa juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan IPM. Dana yang dialokasikan pada belanja desa dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pembangunan sekolah, puskesmas, jalan dan fasilitas umum lainnya. Investasi ini secara langsung dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan manusia berkelanjutan. Apabila pendapatan dan belanja desa dikelola dengan baik maka potensi kontribusinya terhadap peningkatan IPM menjadi optimal. Pemberdayaan masyarakat desa melalui partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan juga dapat meningkatkan penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, sebagai strategi untuk mendukung pembangunan manusia berkelanjutan di tingkat daerah, peningkatan pendapatan dan belanja desa harus lebih ditingkatkan. Dengan demikian, keseimbangan pendapatan dan belanja desa yang baik akan berdampak positif terhadap indeks pembangunan manusia sehingga tercipta masyarakat desa yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.

### **Pendapatan Desa dan Belanja Desa berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia**

Berdasarkan hasil didapatkan bahwa yang memiliki pengaruh dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia pada keresidenan Bojonegoro yaitu Lamongan. Hal ini dapat dilihat dari variabel pendapatan dan belanjanya signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga dapat dikatakan penggunaan APBDesa terlaksana secara menyeluruh diwilayahnya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sesuai dengan hasil dan pembahasan dapat dikatakan dari ketiga kabupaten yang memiliki peran pada indeks pembangunan manusia yaitu kabupaten lamongan. Hal ini ditunjukkan dengan pendapatan desa dan belanja desa signifikan dan mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Kejadian ini membuktikan bahwa pendapatan desa yang naik dan belanja desa yang tepat dapat membangun kehidupan manusia di kabupaten lamongan.

#### **5.2. Saran**

Penelitian ini menggunakan waktu 5 tahun sehingga kedua kabupaten belum menunjukkan alokasi pendapatan dan belanja belum mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Peneliti berharap penelitian selanjutnya menggunakan data yang lebih banyak dari 5 tahun dan menambahkan variabel untuk melihat kontribusinya terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga penelitian dapat dijadikan pertimbangan oleh pemerintah daerah dalam mengalokasikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Y. 2018. Kebijakan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Indonesia. Jakarta: Indocamp.
- Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembnagunan Manusia Kabupaten Bojonegoro 2019. <https://bojonegorokab.bps.go.id> diakses pada 12 September 2023
- Einarsson, N., Nymand Larsen, J., Nilsson, A., & Young, O. R. 2004. Arctic human development report. Stefansson Arctic Institute.
- Ghozali, I. (2012). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Universitas Diponegoro
- Hanantoko, R. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2018. Jurnal Ilmu Ekonomi. Volume 02 (01): 17-33, <https://journal.uwks.ac.id/index.php/economie/article/view/1152>
- Hopkins, M. 1991. Human development revisited: A new UNDP report. World Development, 19(10), 1469-1473.
- Juliana, Rukmana. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bogor Tahun 2010-2016. Jurismata (Jurnal Riset Mahasiswa Dewantara). Volume 2 (1):1-12, <http://www.ejournal.dewantara.ac.id/index.php/JURISMATA/article/view/204>
- Khusaini, M. 2006. Ekonomi publik: Desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah. Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Maqin, A. 2007. Indeks Pembangunan Manusia: Tinjauan Teoritis dan Empiris di Jawa Barat. Pelatihan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia. Kab. Sumedang.
- Mardiasmo, M. B. A. 2021. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru. Penerbit Andi.
- Martinez-Vazquez, J., & Boex, J. 1999. Fiscal decentralization in the russian federation during the transition. Georgia State University, Andrew Young School of Policy Studies, International Studies Program Working Paper, 99-3.
- Oates, W. E. 1972. Fiscal federalism. Books.
- Qasim, A. W. 2013. United Nations development programme (UNDP). Human development report 2013. Pakistan Development Review, 52(1), 95-96.
- Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia 1945.
- Sembiring, EA. 2019. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

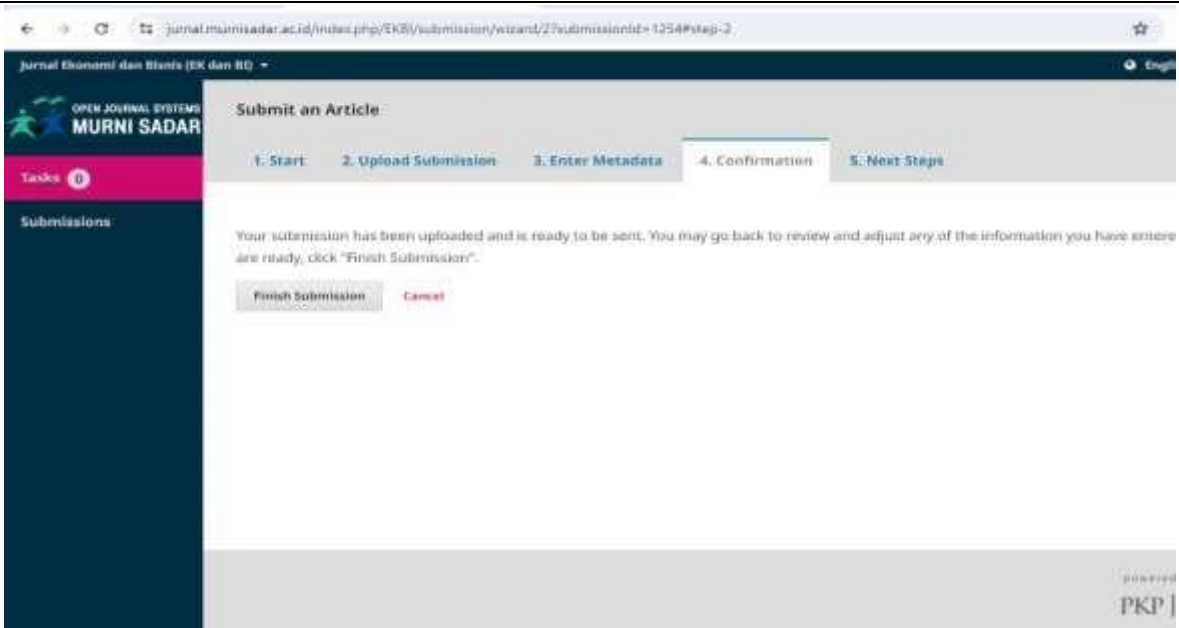
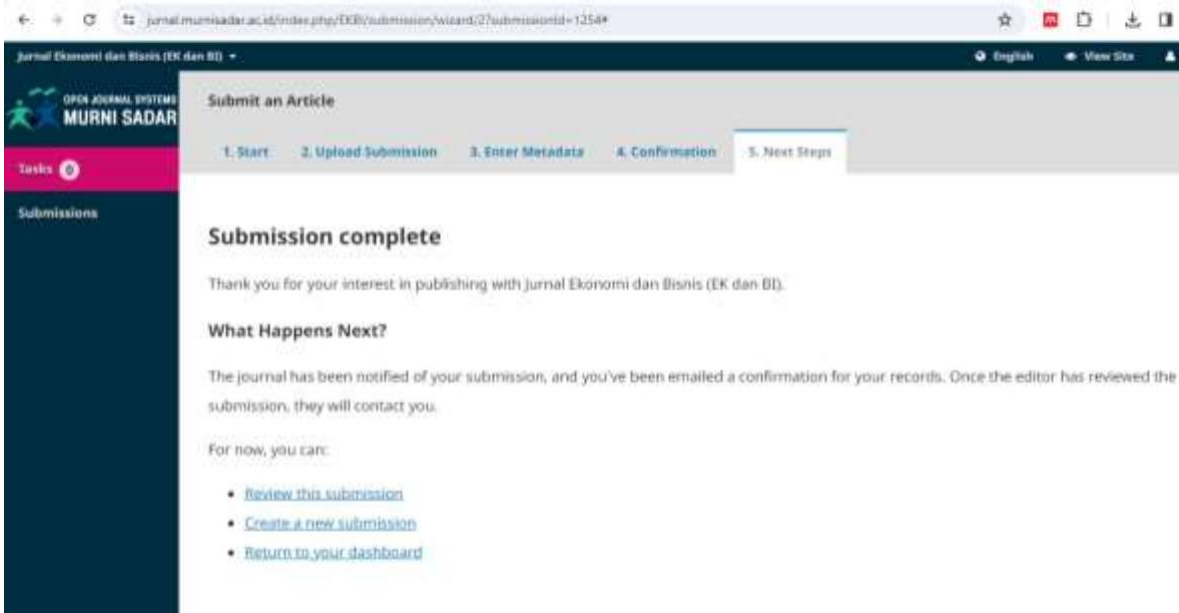
- Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Utara. *Accumulated Journal (Accounting and Management Research Edition)*. Volume 1 (2):160-170, <http://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Accumulated/article/view/591>
- Sudantoko, H. D. (2003). *Dilema otonomi daerah*. Andi.
- Sumarsono, H., & Utomo, S. H. (2009). Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya bagi Pertumbuhan Daerah. *Jurnal Ekonomi Studi Pembangunan*, 1(3), 157-168.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia 1945*.
- Williantara, Budiasih. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pada Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*. Volume 16(3):2044-2062, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/19203>
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. 2018. *Pajak daerah dalam pendapatan asli daerah*. Deepublish.

# Data Penelitian

| Tahun | Keresidenan | Pedapatan Daerah (X1) | Belanja Daerah (X2) | IPM (Y)     |
|-------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 2017  | Bojonegoro  | 8.86029039            | 8.853470187         | 1.827885983 |
| 2018  | Bojonegoro  | 8.882093163           | 8.874809514         | 1.831549852 |
| 2019  | Bojonegoro  | 9.089233169           | 9.057088765         | 1.837272703 |
| 2020  | Bojonegoro  | 8.913567774           | 8.961531983         | 1.839100783 |
| 2021  | Bojonegoro  | 8.965147608           | 8.943800185         | 1.842546836 |
| 2017  | Tuban       | 8.613173745           | 8.612467125         | 1.824581376 |
| 2018  | Tuban       | 8.618321512           | 8.617496958         | 1.82885316  |
| 2019  | Tuban       | 8.651992054           | 8.653294249         | 1.83486558  |
| 2020  | Tuban       | 8.652089942           | 8.660665463         | 1.835056102 |
| 2021  | Tuban       | 8.703862358           | 8.689145631         | 1.83828225  |
| 2017  | Lamongan    | 8.762431306           | 8.760398126         | 1.851930679 |
| 2018  | Lamongan    | 8.749552411           | 8.744093952         | 1.857151503 |
| 2019  | Lamongan    | 8.800918122           | 8.796402975         | 1.860757123 |
| 2020  | Lamongan    | 8.812717678           | 8.808880526         | 1.860816964 |
| 2021  | Lamongan    | 8.820325421           | 8.816178292         | 1.864036183 |



## Bukti Submit pada OJS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |  <p>The screenshot shows the 'Submit an Article' wizard at step 4, 'Confirmation'. The progress bar indicates steps 1 (Start), 2 (Upload Submission), 3 (Enter Metadata), 4 (Confirmation), and 5 (Next Steps). The main content area states: 'Your submission has been uploaded and is ready to be sent. You may go back to review and adjust any of the information you have entered are ready, click "Finish Submission"'. There is a 'Finish Submission' button and a 'Cancel' link. The left sidebar shows 'Tasks' with 0 items and 'Submissions'. The top navigation bar includes the journal name 'Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BB)' and the logo 'OPEN JOURNAL SYSTEMS MURNI SADAR'. The bottom right corner mentions 'POWERED BY PKP'.</p>                                                                                                                                     |
| 2 |  <p>The screenshot shows the 'Submit an Article' wizard at step 5, 'Next Steps'. The progress bar indicates steps 1 (Start), 2 (Upload Submission), 3 (Enter Metadata), 4 (Confirmation), and 5 (Next Steps). The main content area displays 'Submission complete' and a thank you message: 'Thank you for your interest in publishing with Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BB)'. It then asks 'What Happens Next?' and explains that the journal has been notified and a confirmation email has been sent. It provides three links: 'Review this submission', 'Create a new submission', and 'Return to your dashboard'. The left sidebar shows 'Tasks' with 0 items and 'Submissions'. The top navigation bar includes the journal name 'Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK dan BB)' and the logo 'OPEN JOURNAL SYSTEMS MURNI SADAR'. The bottom right corner mentions 'POWERED BY PKP'.</p> |